

KEBIJAKAN MILITER RUSIA TERHADAP SURIAH DALAM MENDUKUNG REZIM BASHAR AL-ASSAD (2015-2020)

Riezky Poetra Phoenna¹, Chandra Purnama², Windy Dermawan³

¹Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email : Riezkypoetra90@gmail.com, chandra.purnama@unpad.ac.id, windy.dermawan@unpad.ac.id

Submitted: 13-02-2023; Accepted: 03-03-2023; Published :10-03-2023

ABSTRAK

Sebagai satu-satunya sekutu tradisional yang dimiliki Rusia di luar lingkungannya sendiri, Suriah telah menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Rusia. Ketika Suriah dilanda konflik, Rusia telah mengerahkan berbagai dukungan penting terhadap rezim Assad. Upaya mempertahankan rezim Assad memaksa Rusia untuk menggunakan kebijakan militer di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kebijakan militer Rusia dalam keterlibatannya di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan militer Rusia terhadap Suriah ditenggarai oleh faktor Bashar Al-Assad. Situasi konflik yang semakin mengancam eksistensi rezim Assad direspon Rusia dengan tindakan militer. Pada akhirnya tindakan militer Rusia berhasil mempertahankan Assad dari ancaman pelengseran.

Kata Kunci: Rusia, Intervensi Militer, Suriah, Kebijakan Luar Negeri

ABSTRACT

As the only traditional ally that Russia has outside of its own neighborhood, Syria has been a consideration in Russian foreign policy. As Syria has been engulfed in conflict, Russia has mobilized important support for the Assad regime. Efforts to defend the Assad regime compelled Russia to intervene militarily in Syria. The purpose of this study is to explain the phenomenon of Russia's military policy in Syria. In analyzing foreign policy, researchers use foreign policy theory. The method used in this research is descriptive-qualitative. This research shows that Russia's military policy towards Syria is driven by the Bashar al-Assad factor. The conflict situation that increasingly threatened the existence of the Assad regime was responded to by Russia with military action. In the end, Russia's military action succeeded in defending Assad from the threat of ouster.

Keywords: Russia, Military Intervention, Syria, Foreign Policy

PENDAHULUAN

Sebagai pewaris Uni Soviet, kebijakan luar negeri Rusia tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kebijakan di masa lalu. Rusia memiliki kebijakan luar negeri yang pragmatis dalam rangka melindungi kepentingannya. Rusia berupaya untuk menggapai kembali status sebagai kekuatan besar dengan terus memperluas serta mempertahankan pengaruhnya dalam sistem internasional. Melalui kebijakan luar negeri yang pragmatis di bawah Vladimir Putin, Rusia berupaya untuk mengambil setiap kesempatan yang berpotensi untuk peningkatan statusnya.

Upaya Rusia untuk merangkul serta bersahabat dengan negara-negara yang memiliki persamaan persepsi merupakan salah satu pola dari kebijakan luar negeri Rusia. Dalam rangka menunjang pola tersebut Rusia mengandalkan berbagai instrumen diantaranya yaitu, diplomatik, militer, intelijen, *cyber*, perdagangan, energi, dan keuangan untuk memengaruhi sistem politik, sikap publik, dan pembuat keputusan elit di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Rusia juga berupaya untuk mereduksi tatanan global di bawah pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan legitimasi dengan mempromosikan Rusia sebagai kekuatan global dan pemecah berbagai masalah global (Gurganus, 2018).

Terkait dengan Timteng di bawah kepemimpinan Putin, Rusia telah kembali menunjukkan minatnya untuk menjadi pemain global yang berpengaruh di kawasan. Peristiwa "*Arab Spring*" yang terjadi di Timur Tengah telah mendorong Rusia untuk ikut terlibat lebih jauh di dalamnya. Rusia tidak memiliki pilihan selain ikut terlibat dalam rangka mengimbangi keterlibatan Barat. Selain itu terdapat kepentingan yang wajib dipertahankan Rusia di luar lingkungannya yaitu Suriah. Sebagaimana yang diketahui Suriah merupakan satu-satunya sekutu tradisional yang dimiliki Rusia di luar lingkungannya sendiri. Hubungan Rusia-Suriah telah menjadi warisan penting dari kebijakan luar negeri yang diwariskan oleh Uni Soviet. Destabilitas politik yang terjadi di Suriah telah mendorong Rusia untuk terlibat lebih jauh. Rusia dihadapkan pada berbagai ancaman yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya di luar lingkungannya sendiri.

Destabilitas politik di Suriah telah menyebabkan negara tersebut terjerumus kedalam perang sipil. Sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat Suriah terhadap rezim Assad yang telah berkuasa selama puluhan tahun lamanya, mendorong rakyat Suriah untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi awalnya dipicu oleh penangkapan beberapa anak kecil di Dara'a. Penangkapan tersebut ditengarai oleh upaya provokasi yang dilakukan dengan menuliskan simbol-simbol yang berupaya menuntut Assad lengser dari kepemimpinannya. Lantas tindakan penangkapan tersebut dianggap oleh masyarakat Suriah sebuah hal yang berlebihan dan otoriter. Rentetan peristiwa Arab Spring sebelumnya di Tunisia dan Mesir telah memotivasi masyarakat Suriah untuk melakukan hal yang sama dalam rangka menuntut Assad untuk segera lengser dari posisinya karena dianggap sebagai pemerintahan otoriter (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Tuntutan yang berbuah protes dan demonstrasi di sejumlah wilayah di Suriah kemudian direspon dengan kekerasan oleh polisi. Terjadi penembakan terhadap massa yang melakukan demonstrasi, sehingga amarah massa justru semakin tidak dapat dikendalikan. Akibatnya sejumlah masyarakat mulai melakukan aksi protes di wilayah-wilayah Suriah lainnya dengan eskalasi yang lebih tinggi. Alhasil gelombang kecil yang awalnya hanya melakukan protes kemudian pecah menjadi aksi kekerasan. Aksi kekerasan tersebut kemudian berubah menjadi kekerasan bersenjata. Pihak oposisi yang ingin segera melengserkan Assad merencanakan operasi mereka yang dimulai dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh mayoritas pihak oposisi.

Pada saat kekerasan bersenjata berubah menjadi perang sipil, situasi Suriah menjadi mencekam. Publik Suriah sendiri terbagi menjadi kelompok oposisi dan pemerintahan yang saling berperang. Konflik Suriah mendapatkan sejumlah respon dari komunitas internasional. Bahkan beberapa negara ikut mendukung kelompok oposisi yang menyerukan pelengseran Assad. Dukungan tersebut dibuktikan dengan bantuan persenjataan terhadap kelompok oposisi. Konflik Suriah sendiri

telah menyeret beberapa aktor yang berkepentingan (Pillon, 2014).

Secara umum aktor-aktor yang berperan di Suriah terbagi menjadi dua yaitu : aktor internal dan eksternal. Aktor internal adalah rezim Assad sendiri dengan pasukannya Syrian Arab Army serta pasukan loyalis seperti Hizbullah, Militan Shabiha dan Republican Guard. Selanjutnya aktor internal dari pihak oposisi seperti Syrian National Coalition, kelompok Kurdi dan Free Syrian Army. Dalam perjalanannya kelompok beberapa kelompok dari oposisi bergabung dengan kelompok teroris terbesar seperti ISIS yang beroperasi di Irak dan Suriah. Sementara aktor-aktor eksternal merupakan beberapa negara yang pro dan kontra terhadap Assad. Rusia, Iran dan Cina merupakan sejumlah negara yang mendukung Assad. Sedangkan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Israel dan Turki merupakan sejumlah negara yang ingin Assad segera lengser (Pillon, 2014).

Keterlibatan Rusia sebagai pendukung Assad telah mendorongnya untuk terlibat lebih jauh dalam melindungi Assad. Bagi Rusia, Suriah merupakan kawasan kepentingan strategis yang dapat menjadi alat dalam melawan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain itu penyebaran jaringan kelompok ekstrimis yang begitu cepat dianggap Rusia dapat menjadi ancaman terorisme hingga ke wilayah terdekat Rusia (Pillon, 2014). Keterlibatan aktif dalam mendukung Assad memaksa Rusia untuk berhadapan dengan negara-negara Barat yang berlawanan sikap. Tak jarang perbedaan tersebut melahirkan situasi konfrontatif di antara aktor-aktor yang terlibat.

Namun, Rusia menyadari bahwa banyak hal yang akan dipertaruhkan jika upaya Barat untuk melengserkan rezim Assad berjalan mulus. Berbagai pertimbangan seperti kekhawatiran intervensi Barat di masa lalu, hubungan tradisional warisan Uni Soviet, kepentingan material dan geopolitik Rusia dalam hubungannya dengan Suriah hingga ancaman keamanan terhadap stabilitas di lingkungan Rusia (Allison, 2013). Oleh karena itu sebagai salah satu mitra strategis, Rusia akan menempuh berbagai langkah untuk mempertahankan segala kepentingan yang menyangkut hubungannya dengan Suriah.

Pada tahun 2015, Rusia melalui kebijakan militernya, melakukan intervensi militer pertamanya di luar lingkungannya sendiri. Upaya

militer telah melengkapi upaya diplomatik Rusia yang telah dilakukan sebelumnya. Keputusan menempuh upaya militer merupakan pertimbangan akan situasi Suriah yang semakin tidak terkontrol. Situasi tersebut berpotensi besar akan membuat Assad lengser dari posisinya. Dengan demikian kegagalan untuk menemukan kesepakatan memaksa Rusia untuk menggunakan kebijakan militernya langsung di Suriah. Sebagai pijakan penting bagi Rusia untuk kembali memulihkan statusnya dalam sistem internasional, Suriah telah menjadi pertaruhan Rusia di kawasan.

Kebijakan militer yang dilakukan Rusia telah memaksa Barat untuk duduk berunding bersama dalam satu meja. Suriah telah menjadi mitra penting bagi Rusia karena faktor netralitas Suriah terhadap Barat. Selain itu Rusia mewarisi aset penting berupa pelabuhan Tartus yang telah digunakan sejak masa Uni Soviet eksis. Pelabuhan Tartus telah menyediakan akses langsung ke wilayah Mediterania. Dibandingkan dengan mitra-mitra Rusia lainnya di Timur Tengah, hubungan Rusia-Suriah selalu lebih politis dan strategis dibandingkan ekonomi (Kreutz, 2010). Hal inilah yang kemudian membuat kebijakan luar negeri Rusia pro aktif terhadap Suriah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan memahami suatu individu dan kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2012). Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan mendeskripsikan dinamika kebijakan militer Rusia atas dukungannya terhadap rezim Bashar Al-Assad dalam konflik Suriah. Adapun data-data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah hasil dari studi literatur. Penelitian ini disusun melalui pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal, situs resmi, media daring, dan internet yang peneliti anggap kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sosial dan Politik Hubungan Rusia-Suriah

Sebagai salah satu pola dari kebijakan luar negeri Rusia, meningkatkan kemitraan dengan negara yang memiliki persamaan pandangan dan persepsi merupakan salah satu cara untuk menciptakan kekuatan-kekuatan baru dalam menentang hegemoni Amerika Serikat. Hal inilah yang kemudian mendorong Rusia untuk memperluas jangkauan pengaruhnya hingga ke luar lingkungannya sendiri. Sejak terjadinya peristiwa Arab Spring di Timur Tengah, Rusia merasa tidak memiliki pilihan lain selain ikut terlibat dalam menyeimbangkan destablilisasi politik yang telah diciptakan oleh Barat. Secara umum keterlibatan Rusia di Timteng dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu keamanan, ekonomi dan politik. Aspek keamanan bertujuan untuk mengurangi ancaman keamanan yang berpotensi merusak stabilitas Rusia. Aspek ekonomi bertujuan untuk mengamankan sumber daya energi yang dapat untuk meningkatkan pengaruh global. Aspek politik bertujuan untuk mengamankan pengaruhnya serta mengimbangi keterlibatan Barat di timteng (Tarek, 2021).

Selain tiga aspek utama, terdapat aspek penting lainnya yang mendorong Rusia untuk menjaga eksistensinya di Timteng. Aspek tersebut adalah militer. Aspek militer memiliki pengaruh terbesar terhadap kebijakan luar negeri Rusia di Timteng. Faktor militer pulalah yang kemudian mendorong Rusia untuk melakukan intervensi militer di Suriah. Sektor militer merupakan hal yang signifikan dalam setiap kebijakan luar negeri yang diambil terhadap Suriah khususnya dan Timteng umumnya. (Allison, 2013), mengungkapkan bahwa sektor militer memiliki presentasi terbesar dalam setiap kebijakan luar negeri Rusia. Sektor militer juga telah memperkuat hubungan Rusia-Suriah sejak masa Uni Soviet. Suriah tidak hanya sekedar *platform* dan pasar senjata bagi Rusia, namun Suriah menjadi fasilitas pengembangan militer Rusia di luar kawasan eks Soviet. Sejak pertengahan 1970-an, Rusia telah menempatkan lebih banyak penasehat militer terhadap Suriah dibandingkan negara lain di kawasan. Bahkan pada saat itu, puluhan perwira terbaik Suriah diberikan pelatihan militer langsung dari Uni Soviet (Charaf et al., 2019)

Sejarah hubungan Rusia-Suriah dimulai pada tahun 1946 dimana pada saat itu Uni Soviet memberikan dukungan atas kemerdekaan Suriah lewat sebuah perjanjian rahasia, tepat sebelum dideklarasikannya kemerdekaan Suriah. Perjanjian tersebut menegaskan bahwa Uni Soviet akan memberikan dukungan diplomatik dalam kancah internasional. Selain itu Uni Soviet juga akan memberikan bantuan militer lewat pembentukan tentara nasional Suriah. Sebuah pakta non-agresi yang telah ditandatangani pada bulan April 1950, menandai babak baru hubungan Suriah dan Uni Soviet ke jenjang yang lebih tinggi (Aghayev & Katman, 2012).

Hubungan Uni Soviet-Suriah tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kemerosotan yang dialami Uni Soviet di bawah Gorbachev yang berujung runtuhnya Uni Soviet. Situasi tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi lebih dingin. Pasca Uni Soviet runtuh, hubungan Suriah dan Rusia memasuki babak baru, dimana pada saat itu hubungan kedua negara hanya sebatas formalitas saja. Bantuan militer dan ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh Uni Soviet, tidak lagi dilakukan oleh Rusia yang pada saat itu dipimpin oleh Boris Yeltsin. Namun pangkalan militer milik angkatan laut Rusia masih tetap dipertahankan keberadaannya (Aghayev & Katman, 2012).

Sikap dingin Rusia terhadap Suriah perlahan mulai berkurang seiring dengan perkembangan sistem internasional. Hubungan kedua negara secara perlahan kembali terbentuk mengikuti situasi global dan regional. Vladimir Putin adalah sosok yang menjadi kunci dalam peningkatan hubungan kedua negara. Merangkul kembali Suriah merupakan salah satu strategi kebijakan luar negeri Rusia di era kepemimpinan Putin. Bagi Putin hubungan kedua negara tidak dapat dilepas dari sejarah panjang jauh sebelum Uni Soviet runtuh. Suriah telah menjadi sekutu penting Rusia di kawasan Timur Tengah. Sehingga kerjasama kedua negara kembali meningkat di era pemerintahan Putin (Aghayev & Katman, 2012).

Kepemimpinan Vladimir Putin telah menempatkan Suriah dalam kebijakan Rusia yang lebih luas untuk waktu yang lama. Pada

dasarnya, hubungan Rusia-Suriah tidak terpaku pada persoalan ekonomi. Bahkan kesepakatan ekonomi Rusia dengan Israel dan Turki jauh melebihi kesepakatan Rusia-Suriah. Oleh karena itu faktor ekonomi tidak menjadi permasalahan utama melainkan faktor politis dan strategis masih memiliki bobot yang lebih tinggi dalam hubungan Rusia-Suriah (Kreutz, 2010)

Suriah memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Rusia. Rusia menyadari bahwa kawasan Timteng hampir sepenuhnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Sehingga Suriah menjadi satu-satunya sekutu tradisional bagi Rusia. Suriah menawarkan keuntungan strategis seperti akses ke Mediterania, pijakan utama di kawasan hingga kesempatan Rusia untuk memperoleh pengaruh terkait hubungan Suriah-Israel. Sebaliknya Suriah mengandalkan Rusia untuk mendapatkan perlindungan diplomatik terhadap berbagai kemungkinan ancaman dari AS dan Israel. Selain itu Rusia menawarkan peralatan militer yang dapat digunakan Suriah untuk menangkal berbagai ancaman (Kreutz, 2010).

Di tengah menghangatnya hubungan kedua negara, Rusia harus menghadapi realitas Suriah yang sedang terperosok kedalam lingkaran konflik. Fenomena "*Arab Spring*" yang telah menghantam satu-persatu negara Arab, ikut menyeret Suriah kedalamnya. Sebagai mitra sejati, Rusia tidak ingin melihat Suriah jatuh lebih jauh ke dalam kekacauan yang terjadi. Oleh karena itu pada tahap awal Rusia mencoba berfokus untuk memberikan pendampingan diplomatik terhadap rezim Assad. Bahkan untuk menggagalkan skenario Barat dalam melengserkan Assad, Rusia telah melakukan berbagai Veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan terkait Suriah (Fatmawati, 2020).

Tidak hanya dukungan diplomatik, Rusia juga memberi dukungan militer terhadap rezim Assad. Rusia telah mengabaikan permintaan Barat untuk memblokir pengiriman senjata dari Rusia ke Suriah. Rusia bersikukuh bahwa persenjataan yang dikirim ke Suriah merupakan pesanan yang telah dibayarkan pemerintah Suriah dan wajib dikirimkan secara penuh. Sebagaimana yang diketahui bahwa Suriah-Rusia telah menandatangani kontrak persenjataan senilai \$ 687 juta pada tahun 2011 dan 2012. Dengan begitu Rusia menegaskan bahwa pengiriman senjata ke Suriah di tengah konflik untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati bersama.

Rusia menilai hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atas sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Suriah (Fatmawati, 2020).

Hingga tahun 2015, tidak ada satupun dari tindakan politik yang diupayakan Rusia membuahkan hasil. Kesepakatan penting di atas meja yang dapat dicapai Rusia adalah menggagalkan niat Barack Obama untuk menggunakan langkah-langkah militer terhadap rezim Assad. Dalam hal ini, kesepakatan penting Rusia-AS telah menyelamatkan rezim Assad dari ancaman AS. Kendati demikian, upaya diplomatik Rusia tidak membuahkan apapun terkait situasi konflik Suriah. Pada akhirnya hal tersebut memaksa Rusia untuk memberlakukan kebijakan militer di Suriah. Keterlibatan militer Rusia di Suriah sejak September 2015 semakin meningkatkan hubungan Rusia-Suriah. Intervensi militer berubah menjadi ambisi yang lebih luas. Terlebih keberhasilan opsi militer telah memberi konsesi penting bagi Rusia terkait kesepakatan penggunaan Pelabuhan Tartus untuk 49 tahun selanjutnya. Rusia secara drastis telah memperluas fasilitas angkatan lautnya di Tartus (Hamilton, Miller, & Stein, 2020).

Sejak memulai operasi militernya di Suriah, Rusia telah meningkatkan pengerahan pasukan militernya ke pangkalan udara di Latakia yang terletak di Barat Laut Suriah. Sejumlah peralatan militer seperti tank T-90, jet tempur Su-24, Su-34, helikopter serang Mi-24 dan drone pengintai telah dikerahkan oleh Rusia. Selama menjalankan misinya, Rusia memiliki kewenangan penuh di wilayah udara Suriah. Sehingga Rusia menjadi penjamin akan operasi militer di darat yang didukung oleh pasukan loyalis. Kewenangan besar yang dimiliki Rusia di wilayah udara Suriah memaksa koalisi anti ISIS pimpinan Amerika Serikat untuk melakukan koordinasi dengan Rusia. Dengan demikian, keterlibatan militer Rusia di Suriah telah berpengaruh langsung terhadap status Rusia (Kaim & Tamminga, 2015).

PEMBAHASAN

Kebijakan Militer Rusia Di Tengah Tersudutnya Bashar Al-Assad

Kebijakan Rusia yang mendorong kekuatan militernya untuk hadir langsung di Suriah disebabkan oleh semakin tersudutnya rezim Assad. Meski Rusia telah mendukung Suriah melalui arena diplomatik serta bantuan persenjataan, namun pada faktanya populasi kelompok oposisi semakin meningkat tajam. Bahkan di tengah upaya untuk melawan kelompok oposisi, pemerintah Suriah harus menghadapi kelompok teroris terbesar seperti ISIS. Baik kelompok oposisi maupun teroris, keduanya telah menguasai hampir separuh dari wilayah Suriah. Dengan pengalaman sebagaimana yang terjadi di Libya, Rusia berupaya untuk tidak membiarkan Suriah bernasib sama. Selain itu Rusia memiliki motivasi tinggi terkait statusnya dalam sistem internasional. Rusia melihat kesempatan yang dapat menguntungkannya di tengah isolasi Barat akibat aneksasi Krimea. Dengan intervensi militer langsung, Rusia berharap akan melampaui AS serta memaksanya untuk berunding langsung dalam posisi yang setara. Dengan begitu, Rusia akan tetap mendulang keuntungan di tengah sanksi-sanksi AS. Pertaruhan akan keberhasilan intervensi militer diharapkan dapat meningkatkan status Rusia sebagai aktor kunci dalam konflik (Hamilton, Miller, Stein, et al., 2020).

Pertimbangan semakin tersudutnya Assad pada posisinya memperkuat alasan Rusia untuk menggunakan tindakan militer di Suriah. Setidaknya terdapat 3 alasan untuk menyatakan bahwa rezim Assad semakin tersudut. *Pertama*, pada bulan Juni 2014, kelompok jihadis telah menaklukkan kota Mosul di Irak dan berhasil merebut lebih dari 2.700 tank, sejumlah kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri, artileri dan sejumlah senjata modern lainnya dimana sebagian besar berasal buatan Amerika Serikat. Persenjataan militer tersebut kemudian dikirim ke Suriah. Pada tanggal 29 Juni 2014, Al-Baghdadi mengumumkan berdirinya kekhalifahan ISIS yang penyebarannya ke wilayah Barat Irak dan Timur Suriah. Hal ini kemudian menjadi masalah baru bagi Assad yang memaksanya untuk mengalokasikan pasukan yang lebih memadai. *Kedua*, Iran sebagai pendukung Assad terpaksa mengurangi dukungan militernya dan mengarahkannya ke Irak dalam

rangka melawan ISIS. Selain itu Iran harus bertindak dengan sangat hati-hati dikarenakan sedang menunggu kesepakatan perjanjian program nuklir. Keterlibatan yang berlebihan di mata Barat, akan dipersepsikan secara negatif dan berpotensi menggagalkan kesepakatan. *Ketiga*, tahun 2015 adalah tahun keempat peperangan berjalan. Hal tersebut membuat tentara Suriah kelelahan dan mengharuskan mereka untuk melakukan rotasi. Pada awal konflik saja Assad hanya dapat menggunakan 30% dari total kekuatan militernya. Sejak awal pemberontakan, kurangnya persiapan dari tentara Suriah telah menyebabkan kehilangannya ratusan tank dan kerusakan parah terhadap peralatan militer (Wójtowicz et al., 2019).

Rusia mengawali operasi militer di Suriah dengan mengirimkan 33 pesawat tempur dan 17 helikopter. Adapun jenis pesawat tempur yang dikirim terdiri dari 12 pesawat tempur Su-24M2, 12 pesawat tempur Su-25M/UB, 4 pesawat tempur Su-34, 4 pesawat tempur S-30 SM, satu pesawat tempur serbaguna (multiperan) dan satu pesawat pengintai. Sementara pada *lineup* helikopter terdiri dari 12 helikopter serang Mi-24P dan 5 helikopter pengangkut Mi-8 AMTSh. Setelah terjadinya insiden dengan Turki, kemudian Rusia kembali mengirimkan tambahan pesawat tempur yang terdiri 4 pesawat tempur Su-35, 4 pesawat tempur Su-34 dan tambahan helikopter serang Mig-35 yang telah diperbaharui. Baik pesawat tempur maupun helikopter Rusia yang berada di Pangkalan Udara Khmeimim diperkuat oleh sistem pertahanan udara S-400 dan beberapa perangkat elektronik untuk perlindungan udara. Instalasi sistem pertahanan udara S-400 dilakukan untuk menghindari insiden dengan Turki terulang kembali (Kofman, 2020).

Operasi militer yang berfokus pada serangan udara bukan tanpa kesulitan, Rusia harus melakukan koordinasi dengan koalisi AS yang juga menggunakan serangan udara dalam melawan kelompok ISIS. Baik Rusia maupun AS berupaya untuk membangun saluran bersama untuk menghasilkan nota kesepahaman dalam rangka mencegah terjadinya bentrokan di wilayah udara Suriah. Mekanisme pencegahan bentrokan udara diharapkan akan mengurangi eskalasi

yang tidak disengaja di udara. Namun Insiden jatuhnya pesawat tempur Rusia Su-24 yang ditembak oleh F-16 milik Turki, membuktikan bahwa AS bukanlah satu-satunya ancaman terhadap kekuatan udara Rusia (Hamilton, Miller, Stein, et al., 2020).

Fase-Fase Operasi Militer Rusia di Suriah

Secara umum terdapat lima fase dalam operasi militer Rusia di Suriah. *Fase pertama* adalah memprioritaskan kelompok-kelompok yang menjadi ancaman paling signifikan terhadap rezim. Hal inilah yang kemudian mendorong Rusia untuk menargetkan wilayah-wilayah yang mayoritas telah dikuasai oleh kelompok oposisi. Angkatan Dirgantara Rusia (VKS), memprioritaskan sebagian besar pesawat tempur di wilayah kekuasaan oposisi dengan dua tujuan utama yaitu : memulihkan jalur komunikasi darat dan infrastruktur penghubung jalan-jalan utama serta menciptakan ruang penyangga di sekitar wilayah operasi Rusia (Simpson et al., 2018). Sebagaimana yang diungkapkan (Kofman, 2020), Rusia memprioritaskan kelompok oposisi untuk memulihkan jalur komunikasi darat dengan tujuan membebaskan tentara Suriah dari pengepungan oleh oposisi, mengubah momentum dalam peperangan, menghentikan progres serangan terhadap tentara Suriah hingga meningkatkan moral dan mental tentara Suriah serta milisi pro Iran yang berafiliasi dengan rezim Assad (Kofman, 2020).

Namun peristiwa jatuhnya pesawat komersial Rusia *Metrojet Flight 9268* di bulan November 2015 membuat Rusia “murka” terhadap kelompok ISIS. ISIS mengklaim sebagai pihak yang terlibat di balik peristiwa tersebut. Rusia kemudian melakukan apa yang disebut sebagai “hukuman” dengan melakukan serangan udara yang masif terhadap ISIS. Rusia mengerahkan pesawat pembom Tupolev Tu-160 dan Tu-95 MS yang membawa rudal jelajah jarak jauh X-102 serta X-555. Selain itu Rusia juga mengerahkan pesawat pembom dengan ukuran yang lebih kecil seperti Tu-22M3 untuk menyerang target dari jarak yang lebih dekat. Misi balas dendam dilakukan selama berhari-hari telah menghancurkan target bergerak dan tidak bergerak seperti fasilitas produksi dan penyulingan minyak hingga ribuan kapal pengangkut yang direbut oleh ISIS. Serangan Rusia tersebut secara signifikan menghancurkan

infrastruktur minyak yang digunakan ISIS sebagai biaya akomodasi (Hamilton, Miller, Stein, et al., 2020).

Fase kedua, Rusia mengurangi volume serta tempo serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh oposisi. Menyusul adanya upaya politik, pada tanggal 14 Maret 2016, Putin mengumumkan bahwa Rusia akan menarik pasukannya kembali dari Suriah. Strategi ini oleh kebanyakan pengamat dianggap sebagai niat terhadap upaya diplomasi serta penyelesaian perundingan di atas meja. Namun meski begitu strategi ini hanya dianggap sebagai penambahan keuntungan politik bagi Rusia karena pada faktanya Rusia justru menambah jumlah pesawat tempur Rusia di Hmeymim menjadi 42 unit. Setelah pengumuman Putin, Rusia justru memperbaharui kekuatan udaranya dengan mengerahkan helikopter modern Ka-52 Hokum-B dan Mi-28 N Havoc, menarik kembali Su-25 untuk dilakukan peningkatan. Pada tanggal 27 Maret 2016, tentara Suriah berhasil merebut kembali Palmyra dari ISIS berkat bantuan udara Rusia yang terkonsentrasi di wilayah tersebut. Selanjutnya pada bulan September 2016, Rusia semakin mengintensivkan serangannya udara di Aleppo setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Rusia mengerahkan kapal induk Admiral Kuznetsov dalam rangka meningkatkan serangan di Aleppo. Hingga pada bulan Desember 2016, pasukan darat yang dibantu kekuatan udara Rusia telah merebut kembali kota Aleppo dari kelompok oposisi (Simpson et al., 2018).

Fase ketiga, pergeseran serangan terhadap ISIS. Perebutan kembali Aleppo serta gencatan senjata dengan oposisi, bertepatan dengan serangan balasan dari ISIS di wilayah Homs dan Deir AZ-Zour. Pada bulan Januari 2017 ISIS kembali merebut Palmyra dari pemerintah Suriah. Selain itu kelompok ISIS juga berusaha untuk kembali menyebar hingga ke lokasi strategis lainnya di Homs, khususnya pangkalan udara Tyas yang menjadi pangkalan penting bagi VKS. Kebangkitan ISIS tersebut akan mengancam sejumlah fasilitas tempur udara milik Rusia. Hal ini mendorong Rusia untuk fokus terhadap

perlindungan infrastruktur milik Rusia. Rusia mulai menargetkan penuh kelompok ISIS di wilayah Homs dan Deir Az-Zour sebagai prioritas. Pada bulan Mei 2017, keterlibatan serangan udara menjadi faktor utama dari keberhasilan tentara Suriah untuk merebut kembali kota Homs yang pernah menjadi “ibukota bagi oposisi”. Setelah putaran keempat pembicaraan Astana, Rusia mulai mengurangi serangan udara atas dasar kesepakatan gencatan senjata untuk mematuhi empat wilayah zona de-eskalasi yang meliputi Idlib, Homs utara, Ghouta Timur, dan Suriah bagian selatan di bulan Mei 2017 (Simpson et al., 2018).

Fase keempat, fokus utama sebagian besar terhadap kelompok ISIS. Operasi udara Rusia berfokus pada dukungan serangan pasukan tentara gabungan Suriah di wilayah Raqqa, Hama dan Homs terhadap ISIS. Sejak bulan Juli hingga September 2017, sebagian besar serangan udara Rusia menargetkan wilayah yang dikuasai ISIS. Dalam operasi tersebut, VKS telah melakukan peningkatan strategi gabungan mulai dari komando dan kontrol udara serta komunikasi udara ke darat dengan tentara Suriah. Selain itu VKS juga telah melakukan pembaharuan terhadap Su-25 SM3 yang memungkinkan serangan lebih efektif. Selain dukungan udara, Rusia juga menggunakan rudal penjelajah yang ditembakkan dari laut terhadap target ISIS baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov bahwa periode Agustus-September adalah periode intensif serangan udara Rusia sejak dimulai pada September 2015. Serangan intensif tersebut mendorong tentara Suriah untuk melemahkan penguasaan ISIS atas Deir Al-Zour serta membersihkan sisa-sisa kelompok ISIS di Homs dan Hama. Hingga November 2017, tentara Suriah telah membangun kendali penuh atas Deir Al-Zour (Simpson et al., 2018).

Setelah Deir Az-Zour, tentara Suriah kemudian menyasar wilayah sungai Efrat yang menjadi jaringan logistik antara organisasi ISIS di Irak dengan Suriah. Namun ketetapan Sungai Efrat sebagai garis de-eskalasi, memperlambat operasi militer. Sebagaimana yang diketahui bahwa, tentara Suriah dan sekutu melakukan operasi di bagian Barat Sungai Efrat. Sebaliknya SDF dukungan AS serta kelompok YPG Kurdi melakukan operasi di bagian Timur sungai Efrat. Sejak tahun 2017 tentara Suriah dan Suriah mulai menunjukkan niat untuk menguasai bagian Timur sungai Efrat. Hal ini tentu saja dapat merusak

perjanjian de-eskalasi dan menghasilkan resiko baru. Setelah serangan udara Su-22 milik Suriah menargetkan area yang dikendalikan SDF, F-18 AS menembak jatuh Su-22. Peristiwa tersebut ditanggapi Rusia dengan membatalkan nota kesepakatan de-eskalasi dengan AS. Pada september 2017 Rusia mulai mengincar bagian Timur sungai Efrat dan menyerang kelompok SDF. Hal ini kemudian mendorong AS untuk melakukan upaya komunikasi dengan Rusia. Pembicaraan de-eskalasi Rusia-AS pada akhirnya telah mengurangi ketegangan sepanjang sungai Efrat dengan sebagian Timur sungai Efrat dikuasai oleh tentara Suriah (Simpson et al., 2018).

Fase kelima, penetapan pangkalan udara Rusia secara permanen di Suriah. Pada bulan Desember 2017, Vladimir Putin dalam kunjungannya ke pangkalan udara Hmeymim Suriah, menyatakan bahwa “...rezim Suriah telah mencapai kemenangan penuh atas ISIS di kedua tepi sungai Efrat di Suriah”. Pernyataan tersebut ditandai dengan penarikan kembali sebagian pasukan Rusia dari Suriah. VKS menarik kembali sepertiga kekuatan udara dari Suriah. Meski begitu serangan udara ke untuk mendukung tentara Suriah tetap dipertahankan. Terlebih Rusia mendapatkan izin penggunaan pangkalan udara Hmeymim untuk 49 tahun ke depan. Serangan udara lanjutan untuk mendukung tentara Suriah dalam melawan sisa-sisa kelompok oposisi di wilayah Idlib, Ghouta Timur dan Hama terus berlanjut. Pada tahap ini Rusia telah membangun jaringan-jaringan operasi militer yang lebih baik dan berpengalaman di seluruh Suriah. Serangan tahap lanjutan Rusia terbukti lebih efektif dan signifikan dalam melemahkan kelompok oposisi (Simpson et al., 2018).

Pada tahun 2018, operasi militer untuk melawan kelompok ISIS semakin berkurang. Demikian juga dengan kelompok pemberontak, meski masih tersisa di beberapa wilayah di Suriah bagian Barat, namun hal tersebut tidak menjadi ancaman yang berarti bagi rezim Assad. Meski begitu, Suriah dan sekutu masih belum menemukan solusi tepat atas kelompok oposisi. Sementara itu SDF dukungan AS yang menguasai sebagian Timur sungai Efrat bersikeras untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan menolak untuk berada di bawah

kendali rezim. Terlepas dari keengganan dan ketidakpastian atas kelompok oposisi, tidak ada satupun dari pihak-pihak tersebut yang memberi ancaman layaknya sebelum intervensi militer Rusia. Intervensi Rusia telah mencegah jatuhnya rezim Assad dan membantunya mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah Suriah (Hamilton, Miller, Stein, et al., 2020).

Hingga akhir tahun 2018, Rusia telah menjalankan operasi militernya dengan baik. Rusia berhasil mencegah lengsernya Assad serta memutarbalikkan keadaan dalam waktu 2 tahun lebih setelah intervensi awal di bulan September 2015. Kendati demikian wilayah Suriah belum sepenuhnya dibebaskan dari kelompok pemberontak dan ekstrimis. Bahkan jika kemenangan penuh atas operasi militer Rusia, Suriah tetap akan terbagi menjadi beberapa yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Pada akhir 2018, hampir seperempat dari wilayah Suriah dikendalikan oleh kelompok SDF dukungan AS. Sementara wilayah Suriah bagian Utara diduduki oleh Turki dan pasukan oposisi dukungannya. Oleh karena itu progres untuk menyatukan Suriah sepenuhnya masih cukup jauh dari harapan. Meski telah mencegah jatuhnya rezim Assad, namun Rusia masih belum mampu mengembalikan wilayah Suriah sepenuhnya kedalam kendali rezim. Namun begitu, Rusia telah memperoleh konsesi untuk tetap berada di Suriah hingga puluhan tahun ke depan. Dengan demikian, mempertahankan Assad adalah jalan terbaik untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Suriah (Barnes-Dacey et al., 2018).

Strategi Menghindari Eskalasi Langsung Dengan Turki dan Amerika Serikat

Pada tahun 2019 eskalasi konflik masih terjadi di beberapa wilayah Suriah. Pada saat yang sama secara umum, Suriah telah terbagi menjadi 3 wilayah utama yang dikontrol oleh pemberontak dukungan aktor eksternal. *Pertama*, mayoritas wilayah yang dikuasai oleh rezim Assad yang dilindungi oleh Rusia dan Iran. *Kedua*, wilayah kekuasaan pemberontak Sunni yang didukung Turki seperti Idlib, Al-Bab, Afrin dan barat laut Suriah. *Ketiga*, wilayah yang dikendalikan SDF di bawah perlindungan Amerika Serikat di Timur bagian Timur Suriah dan wilayah kecil terpisah yang diduduki pasukan AS di Al-Tanf. Sebagai presiden Suriah, posisi Assad dalam menguasai mayoritas wilayah Suriah menjadi lebih aman jika

dibandingkan sebelum intervensi Rusia. Pemerintahan Assad menguasai sebagian besar wilayah Suriah di bagian selatan, tengah, hingga ke barat. Terhitung dari 16 ibu kota provinsi di Suriah, 13 di antaranya berada di bawah kendali penuh pemerintahannya. Hal ini juga termasuk kota-kota besar yang meliputi Damaskus, Aleppo, Homs dan Hama (Lund, 2019).

Terkotak-kotaknya wilayah Suriah yang dilatarbelakangi oleh aktor lainnya seperti Turki dan AS memaksa Rusia untuk terus melakukan berbagai pendekatan dengan kedua negara tersebut. Keberadaan pasukan Turki di bagian barat laut Suriah, telah mencegah tentara Suriah untuk merebut kembali wilayah tersebut dari kekuasaan pemberontak. Adapun wilayah kekuasaan pemberontak dukungan Turki membentang dari wilayah Al-Bab yang berdekatan dengan Aleppo, kemudian ke wilayah Afrin yang berpenduduk Kurdi hingga wilayah luas di sekitar Idlib. Penempatan Turki di bagian barat laut Suriah yang meliputi Al-Bab sejak 2016, Afrin sejak 2018, dan Idlib 2017- 2018 didasari oleh kesepakatan Turki-Rusia yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Kesepakatan tersebut berisikan kesepakatan untuk mencegah kelompok pemberontak menyerang tentara Suriah dan Rusia-Iran menahan tentara Suriah untuk tidak menyerang kelompok tersebut. Pengendalian Turki di wilayah bagian barat laut Suriah sangat bervariasi. Turki sangat mendominasi wilayah Al-Bab dan Afrin melalui lembaga-lembaga oposisi serta pemberontak Sunni di bawah bendera (*Free Syrian Army*) FSA. Sementara di wilayah Idlib, Turki hanya mengendalikan sebagian kecil saja. Hal ini dikarenakan wilayah Idlib didominasi oleh kelompok ekstrimis Tahrir Al-Syam yang kemudian dimasukkan kedalam organisasi teroris oleh PBB. Meski telah dimasukkan kedalam organisasi teroris, dalam perjalanannya, intelejen Turki kerap melakukan negosiasi dengan pimpinan kelompok Tahrir Al-Syam untuk menyampaikan kesepakatan gencatan senjata yang dihasilkan dari perundingan Astana (Lund, 2019).

Turki mengandalkan kesepakatan dengan Rusia dalam mencegah tentara

Suriyah dan loyalis untuk melakukan serangan besar-besaran di Idlib. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Suriyah. Selain itu hal yang penting lainnya adalah menghindari gelombang pengungsi baru yang dikhawatirkan akan masuk ke wilayah Turki. Pada dasarnya posisi Turki sangat rumit dan menghadapi ketidakpastian di Suriyah. Namun di sisi lainnya, Turki dapat mengawasi serta menahan pemberontak di kawasan yang diduduki. Sementara Rusia sebagai penengah atas permasalahan Idlib dapat mempengaruhi Suriyah dan lebih penting bagi Rusia adalah tetap menjaga hubungan baik dengan Turki yang notabene anggota NATO. Pertimbangan hubungan Rusia-Turki kerap membuat progres tentara Suriyah dalam menguasai wilayah barat laut Suriyah menjadi lamban (Lund, 2019).

Sementara itu di bagian Timur Sungai Efrat dikuasai oleh *Syrian Democratic Forces* (SDF), dan koalisi Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat. Mayoritas anggota kelompok tersebut didominasi oleh Pasukan Perlindungan Rakyat atau disebut YPG. YPG adalah sayap dari kelompok *The Kurdistan Workers' Party* (PKK) yang telah berperang melawan pemerintah Turki selama puluhan tahun. Daerah kekuasaan SDF berisikan 1/10 dari total warga yang berada di Suriyah. Sebagian besar mereka merupakan suku kurdi dan Sunni Arab diikuti oleh minoritas kecil kristen dan minoritas lainnya. SDF menduduki wilayah Utara Suriyah setelah berhasil memukul mundur ISIS sejak tahun 2015-2017 lewat dukungan Amerika Serikat. Sejak September 2018, SDF membentuk pemerintahan sendiri yang diakui sebagai wilayah Otonomi Suriyah Utara dan Timur. Struktur tertinggi dalam sistem tersebut dipegang oleh anggota PKK (Lund, 2019)

Di sisi lainnya, secara terpisah pasukan AS serta koalisi melakukan patroli di wilayah perbatasan Suriyah-Irak dan Yordania di Al-Tanf, Suriyah bagian Selatan. Namun SDF tidak hadir di wilayah ini. Pasukan AS bekerjasama dengan kelompok kecil Arab Sunni yang dikenal dengan Maghawir Al-Thawra. Baik wilayah SDF maupun Tanf adalah dua wilayah yang dilindungi atas kesepakatan de-konflik militer Rusia-AS. Sehingga tidak ada pihak yang akan melakukan peperangan. Upaya tentara Suriyah dan pasukan loyalis untuk masuk ke wilayah tersebut akan ditolak keras jika tanpa dukungan Rusia. Namun pada bulan Februari 2018, sebelumnya terdapat upaya untuk merebut wilayah SDF yang kaya

akan minyak oleh sebuah kelompok yang bernama Wagner Group. Wagner Group merupakan sebuah organisasi tentara bayaran yang memiliki hubungan dengan Rusia. Kelompok tersebut dikenal luas setelah keterlibatan mereka dalam perang merebut Krimea dari Ukraina tahun 2014. AS merespon upaya kelompok tersebut dengan melakukan serangan yang memakan korban sekitar 200-300 personil tentara bayaran (Lund, 2019).

Keberadaan AS di balik SDF membuat Rusia mengambil strategi menunggu AS dalam memutuskan untuk tetap di Suriyah atau keluar. Turki kerap mengancam akan melakukan serangan terhadap SDF. Sementara Donald Trump berulang kali mengungkapkan rencananya untuk menarik kembali pasukan AS. Pada akhir 2018, Trump mengumumkan bahwa pasukan AS akan ditarik dari Suriyah. Penarikan pasukan AS dari Suriyah telah menyebabkan mundurnya beberapa utusan AS di Suriyah seperti Menteri Pertahanan, James Mattis dan Perwakilan Khusus untuk Koalisi anti ISIS, Brett McGurk. Hal tersebut menambah ketidakpastian AS di Suriyah (Hamilton, Miller, Stein, et al., 2020). Namun meski begitu, penarikan yang dilakukan sangat terbatas. Hal ini dikarenakan Trump menghadapi tekanan internal serta koalisi yang khawatir akan kesempatan pemerintah Suriyah, Turki dan Iran untuk melakukan serangan besar terhadap di wilayah SDF. Merespon hal tersebut, Mazloun Abdi sebagai pemimpin SDF membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa melibatkan AS. Menurutnyanya hanya Rusia yang dapat dipercaya untuk mencegah Turki menyerang SDF setelah penarikan pasukan AS. Sementara Rusia sangat terbuka dengan semua pihak yang terlibat baik SDF, Suriyah, Turki maupun AS. Diplomat Rusia menegaskan bahwa SDF harus tunduk terhadap pemerintah Suriyah dengan harapan akan meyakinkan Turki bahwa pemerintah Suriyah mampu mengatasi ambisi kelompok Kurdi tanpa perlu intervensi dari Turki. Sementara pihak SDF meminta Rusia untuk meyakinkan Assad agar mereka diberikan kesempatan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Pada akhirnya kedua pihak membuat kesepakatan yang mengizinkan tentara Suriyah serta pasukan

Rusia untuk menempati wilayah yang dikendalikan SDF untuk menghindari perlawanan dari Turki (Lund, 2019).

Tidak seperti wilayah kekuasaan SDF, wilayah Al-Tanf dikelilingi oleh gurun pasir yang luas. Al-tanf terletak di jalan raya yang menghubungkan Suriah dan Irak. Wilayah Tanf hanya terdiri dari satu kamp pengungsian. Kamp pengungsian tersebut terletak di dalam zona operasi AS yang berbatasan langsung dengan perbatasan Suriah-Yordania. Baik AS maupun Yordania tidak memiliki niat untuk menerima pengungsi. Sehingga otoritas Suriah memegang penuh kendali atas hak akses kemanusiaan di wilayah tersebut. Suriah menggunakan strategi tarik-ulur dalam memberikan suplai kebutuhan pokok terhadap pengungsi di wilayah tersebut. Otoritas Suriah mendorong pengungsi di kamp tersebut untuk segera kembali ke wilayah yang dikuasai pemerintah. Sementara Rusia mendukung strategi tersebut untuk menunjukkan situasi buruk pengungsi di wilayah yang dikuasai AS dengan harapan dapat mempermalukan AS agar segera keluar dari wilayah tersebut (Lund, 2019).

Keberadaan kelompok SDF dukungan Amerika Serikat di bagian Timur sungai Efrat membuat Rusia mengalihkan serangan ke wilayah bagian Barat Suriah untuk “membersihkan” bagian-bagian kecil dari kelompok pemberontak. Pada bulan Maret 2018 tentara Suriah yang didukung Rusia dari udara merebut kembali Ghouta Timur yang terletak di pinggiran kota Damaskus. Selanjutnya di bulan September 2018, tentara Suriah mengalihkan fokus ke Idlib yang menjadi basis terbesar kelompok oposisi di bagian Barat sungai Efrat. Idlib merupakan wilayah yang sebagian besarnya dikuasai oleh oposisi dukungan Turki. Oleh karena itu, untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Turki kedalam pertempuran, Rusia membuat kesepakatan de-eskalasi terbaru untuk Idlib dan mendirikan pos pengamatan Rusia-Turki di wilayah perbatasan yang dikuasai oposisi. Pada saat yang sama, konfrontasi diam-diam antara Iran dan Israel di wilayah Suriah membuat tertembaknya sebuah pesawat militer Rusia yang menewaskan 15 awak pesawat. Insiden yang dipicu oleh serangan Israel terhadap keberadaan pasukan Iran di wilayah Suriah, membuat sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh pesawat militer Rusia. Segera setelah insiden tersebut, Rusia langsung mengirimkan unit pertahanan

udara S-300 ke Suriah untuk menghadapi ancaman udara (Hamilton, Miller, Stein, et al., 2020).

Hingga akhir tahun 2018, Rusia telah menjalankan operasi militernya dengan baik. Rusia berhasil mencegah lengsernya Assad serta memutarbalikkan keadaan dalam waktu 2 tahun lebih setelah intervensi awal di bulan September 2015. Kendati demikian wilayah Suriah belum sepenuhnya dibebaskan dari kelompok pemberontak dan ekstrimis. Bahkan jika kemenangan penuh atas operasi militer Rusia, Suriah tetap akan terbagi menjadi beberapa yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Pada akhir 2018, hampir seperempat dari wilayah Suriah dikendalikan oleh kelompok SDF dukungan AS. Sementara wilayah Suriah bagian Utara diduduki oleh Turki dan pasukan oposisi dukungannya. Oleh karena itu progres untuk menyatukan Suriah sepenuhnya masih cukup jauh dari harapan. Meski telah mencegah jatuhnya rezim Assad, namun Rusia masih belum mampu mengembalikan wilayah Suriah sepenuhnya kedalam kendali rezim. Namun begitu, Rusia telah memperoleh konsesi untuk tetap berada di Suriah hingga puluhan tahun ke depan. Dengan demikian, mempertahankan Assad adalah jalan terbaik untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Suriah (Barnes-Dacey et al., 2018).

Pada tahun 2019 eskalasi konflik masih terjadi di beberapa wilayah Suriah. Secara umum, Suriah telah terbagi menjadi 3 wilayah utama yang dikontrol oleh pemberontak dukungan aktor eksternal. *Pertama*, mayoritas wilayah yang dikuasai oleh rezim Assad yang dilindungi oleh Rusia dan Iran. *Kedua*, wilayah kekuasaan pemberontak Sunni yang didukung Turki seperti Idlib, Al-Bab, Afrin dan barat laut Suriah. *Ketiga*, wilayah yang dikendalikan SDF di bawah perlindungan Amerika Serikat di bagian Timur Suriah dan wilayah kecil terpisah yang diduduki pasukan AS di Al-Tanf. Sebagai presiden Suriah, posisi Assad dalam menguasai mayoritas wilayah Suriah menjadi lebih aman jika dibandingkan sebelum intervensi Rusia. Pemerintahan Assad menguasai sebagian besar wilayah Suriah di bagian selatan, tengah, hingga ke barat. Terhitung dari 16 ibu kota provinsi di

Suriah, 13 di antaranya berada di bawah kendali penuh pemerintahannya. Hal ini juga termasuk kota-kota besar yang meliputi Damaskus, Aleppo, Homs dan Hama (Lund, 2019).

Sebagai kepala negara, Assad telah mengambil alih kendali atas fungsi dan lembaga negara. Seluruh lembaga negara dijalankan dan didanai langsung dari pusat pemerintahan. Selain di wilayah kekuasaannya, Assad juga mempertahankan kehadiran institusional di wilayah yang dikuasai oleh SDF dan di bagian barat laut yang dikuasai pemberontak dukungan Turki. Menurut data yang dirilis pada tahun 2019, hingga penghujung tahun 2018, sekitar 73% penduduk Suriah dari populasi non-pengungsi berada di bawah kendali Assad. Pada tahun 2019, susunan pemerintahan Assad menjadi sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini ditandai dengan dominannya orang-orang terdekat Assad yang berada dalam struktur pemerintahannya. Kebanyakan di antara mereka berasal dari kelompok minoritas Alawi yang sama dengan Assad. Terlepas dari hal tersebut, pemerintahan Assad tetap menjunjung tinggi sekularisme partai Baath dan mempromosikan keberagaman. Namun meski begitu, rezim Assad tidak memiliki masalah internal yang berarti layaknya gelombang resistensi di tahun 2011. Selain itu Assad berada dalam posisi aman dari intervensi oleh aktor-aktor asing berkat perlindungan dari Rusia (Lund, 2019).

Meski Rusia telah berhasil mencegah lengsernya rezim Assad, namun bayang-bayang ancaman di masa depan tidak dapat diprediksi. Hal tersebut merujuk kepada lima faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, pada tingkat politik internal, kelompok oposisi telah melemah namun tidak sepenuhnya hilang. Situasi tersebut bisa menimbulkan eskalasi lanjutan terutama di wilayah yang didukung aktor-aktor lainnya. *Kedua*, posisi berlawanan Rusia-Amerika Serikat tentang siapa yang menjadi pemimpin Suriah di masa depan. *Ketiga*, proses rekonstruksi Suriah yang tidak mungkin sepenuhnya dibiayai oleh Rusia. Mengingat perekonomian Rusia dalam keadaan yang sulit akibat sanksi-sanksi Barat. Namun meski begitu Rusia mengandalkan kekuatan ekonomi lainnya seperti Cina untuk membangun kembali Suriah. *Keempat*, hubungan kompleks dengan aktor-aktor regional seperti Turki, Iran, Israel, Arab Saudi hingga negara-negara Afrika Utara membuat Rusia tidak leluasa. Meski Iran telah menjadi aliansi dalam perang Suriah, namun keduanya memiliki visi yang

berbeda tentang masa depan Suriah. Proyeksi Iran di Suriah akan menjadi kekhawatiran terhadap musuh-musuh regional lainnya, seperti Israel dan Arab Saudi. Sebaliknya keinginan Rusia untuk mengelola transisi politik yang dapat diterima oleh semua pihak tidak dapat dilakukan dengan alasan kelompok oposisi tidak setuju dengan keberadaan Iran di Suriah. Meski demikian, hubungan Rusia-Iran tetap tidak dapat dipisahkan dalam konflik Suriah. *Kelima*, hubungan Rusia-Turki membuat situasi semakin rumit, terlebih kedua negara memiliki perbedaan sikap terhadap Assad. Meski begitu, kedua negara telah menjalin kerjasama yang solid untuk menemukan solusi di wilayah perbatasan Turki-Suriah (Mezran et al., 2019).

Dalam rangka menghindari ancaman yang tidak menentu terkait masa depan Suriah, Rusia masih harus menghadapi berbagai tantangan berikutnya seperti, mempertahankan kesepakatan status akhir dengan Turki di Idlib dan Suriah bagian Utara yang telah diduduki pasukan Turki serta wilayah Timur Efrat yang diduduki oleh mayoritas suku Kurdi, rekonstruksi ekonomi dengan negara-negara Arab lainnya, menemukan titik terang dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam rangka pencabutan sanksi, memastikan tindakan Rusia dan Iran sejalan dan terkoordinasi dengan baik, hingga mengubah kesuksesan militer menjadi keuntungan ekonomi dan politik. Di antara beberapa tantangan yang telah disebutkan di atas, masalah di wilayah Idlib dan Timur Efrat masih merupakan tantangan terbesar. Hal tersebut bisa saja memicu eskalasi antara Rusia, Amerika Serikat, Turki, Kurdi, Iran dan Suriah sendiri. Rusia dituntut untuk menemukan solusi atas persoalan tersebut. Tanpa adanya kesepakatan dari masing-masing pihak maka tantangan-tantangan lainnya tidak realistis untuk dicapai (Kortunov et al., 2020).

SIMPULAN

Kebijakan militer Rusia di Suriah merupakan hasil dari kalkulasi elit Rusia tentang ancaman nyata jika pelengseran Assad menjadi kenyataan. Tindakan militer

Rusia secara umum dipengaruhi oleh keadaan Assad yang semakin tersudut oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Selain itu Rusia juga berupaya untuk mendapatkan pengaruh dan peningkatan status dalam keterlibatannya di Suriah. Strategi militer Rusia sejak awal adalah membalikkan keadaan yang dapat menguntungkan rezim Assad. Oleh karena itu sejak awal dilakukannya operasi militer, Rusia justru menargetkan kelompok oposisi di samping kelompok teroris. Strategi yang menyasar kelompok oposisi adalah untuk mengubah momentum serta menghentikan kemajuan upaya melawan Assad. Meski secara umum kebijakan militer Rusia telah berhasil mengamankan posisi Assad, namun masih ada pekerjaan tersisa yang harus diselesaikan Rusia. Keterlibatan Turki dan Amerika Serikat di Suriah telah menyebabkan kotak-kotaknya wilayah Suriah ke dalam pengaruh masing-masing aktor tersebut. Oleh karena itu dalam rangka menghindari konfrontasi langsung dengan AS dan Turki, Rusia berupaya untuk terus melakukan perundingan. Rusia harus dapat meyakinkan aktor-aktor terlibat untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Hal tersebut merupakan tantangan terbesar bagi Rusia di tengah keenganan aktor-aktor tersebut untuk keluar dari wilayah Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghayev, E., & Katman, F. (2012). Historical Background and the Present State of the Russian-Syrian Relations. *Evropejskij Issledovatel'*, 35(11-3), 2066-2070. https://www.researchgate.net/profile/Elvin_Aghayev3/publication/235347789_Historical_Background_and_the_Present_State_of_the_Russian-Syrian_Relations/links/58b34769a6fdcc6f03fc2a46/Historical-Background-and-the-Present-State-of-the-Russian-Syrian-Relation
- Allison, R. (2013). Russia and Syria: Explaining alignment with a regime in crisis. *International Affairs*, 89(4), 795-823. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12046>
- Barnes-Dacey, J., Bechev, D., Borisov, T., Frolovskiy, D., Gaub, F., Ghanem-Yazbeck, D., Katz, M. N., Kuznetsov, V., Lavrov, A., Nakhle, C., & Trenin, D. (2018). *Russia's Return To the Middle East: Building Sandcastles?* (N. Popescu & S. Secieru (eds.); Issue July). European Union Institute for Security Studies (EUISS). <https://doi.org/10.2815/777831>
- Charap, S., Treyger, E., & Geist, E. (2019). Understanding Russia's Intervention in Syria. *RAND Corporation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.7249/RR3180>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th editio). Boston : Pearson Education.
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Politica*, 5(1), 37-60.
- Fatmawati. (2020). Perubahan Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah Dalam Konflik Internal Suriah (2011 - 2017). *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 23-41. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1192>
- Gurganus, J. (2018). *Russia: Playing a Geopolitical Game in Latin America*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-pub-76228>
- Hamilton, R. E., Miller, C., & Stein, A. (2020). Russia's War In Syrian: Assessing Russian Military Capabilities And Lessons Learned. In *Political Science*. <https://www.fpri.org/article/2020/09/about-the-book-russia-war-syria/>
- Hamilton, R. E., Miller, C., Stein, A., Borshchevskaya, A., Kofman, M., Grau, L., Bartles, C., Lavrov, A., & Delanoë, I. (2020). *Russia's War in Syria: Assessing Russian Military Capabilities and Lessons Learned* (R. E. Hamilton, C. Miller, & A. Stein (eds.)). Foreign Policy Research Institute.
- Kaim, M., & Tamminga, O. (2015). *Russia's Military Intervention in Syria. Its Operation Plan, Objectives, and Consequences for the West's Policies*. November, 1-4.
- Kofman, M. (2020). Syria And The Russian Armed Forces An Evaluation Of Moscow's Military Strategy And

- Operational Performance. *Foreign Policy Research Institute*.
<https://www.fpri.org/article/2020/09/syria-and-the-russian-armed-forces-an-evaluation-of-moscows-military-strategy-and-operational-performance/>
- Kortunov, A., Khlebnikov, A., Sanae, M., & Shoori, M. (2020). *Russia and Iran in Syria and Beyond : Challenges Ahead* (Issue 59).
- Kreutz, A. (2010). Syria : Russia ' s Best Asset in the Middle East. *Syria*, November, 23.
<https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/kreutzengrussiasyrianov2010.pdf%0A>
- Lund, A. (2019). From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations. *Swedish Institute of International Affairs (UI)*, 1–60.
<https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2019/ui-paper-no.-7-2019.pdf>
- Mezran, K., Varvelli, A., & (eds.). (2019). *The MENA Region: A Great Power Competition* (K. Mezran & A. Varvelli (eds.)). Leditzioni LediPublishing, Milano.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14672/55260718>.
- Pillon, M. (2014). *The Syrian Conflict "Conflict Analysis Of A Multi-Layered Civil War."* 1–66.
www.academia.edu/2F11304521/2FThe_Syrian_Conflict._Conflict_Analysis_of_a_Multi-Layered_Civil_War&usg=AFQjCNHuxImEvE25ObEI0a2_pyC23-ilyA&bvm=bv.122448493,bs.1,d.bGg
- Simpson, M., Grissom, A. R., Mouton, C. A., Godges, J. P., & Hanson, R. (2018). *Road to Damascus : The Russian Air Campaign in Syria, 2015 to 2018*.
- Tarek, N. (2021). *The Russian Foreign Policy towards Syria after the Arab Spring*. 8.
<https://doi.org/10.4236/oalib.1107976>
- Wójtowicz, T., Barsznica, I., & Drag, K. (2019). the Influence of Russian Military Involvement in the War in Syria. *Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej*, 111(2), 85–99.
<https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8529>